

AGAMA DAN PERILAKU POLITIK KIAI

AGAMA DAN PERILAKU POLITIK KIAI

Dr. H. Ahmad Subqi, Lc., M.Sy



AGAMA DAN PERILAKU POLITIK KIAI

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dr. H. Ahmad Subqi, Lc., M.Sy

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama : Oktober 2021

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021

; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-6478-86-8

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggung jawab Penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Agama Dan Perilaku Politik Kiai sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Agama Dan Perilaku Politik Kiai. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN PERTAMA GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI.....	1
A. GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI PRA REFORMASI.....	1
1. Kiai dan Wacana Negara Islam	7
B. GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI PASCA REFORMASI.....	16
1. Gerakan Islam Politik Pasca Reformasi.....	16
2. Kiai dan Wacana Pemberlakuan Perda Syariah.....	29
BAGIAN KEDUA PERILAKU POLITIK KIAI.....	39
A. PERILAKU POLITIK KIAI PASCA REFORMASI	39
1. Politik Identitas Pasca Reformasi.....	39
2. Kiai dan Legitimasi Politik.....	43
3. Perilaku Politik Kiai Pasca Reformasi.....	47
BAGIAN KETIGA DIMENSI KEBERAGAMAAN DALAM PERILAKU POLITIK KIAI.....	73
A. PENGARUH DIMENSI KEBERAGAMAAN DALAM PERILAKU POLITIK KIAI.....	73
B. FAKTOR DIMENSI KEBERAGAMAAN DALAM PERILAKU POLITIK KIAI.....	77
1. Dimensi Keyakinan Agama atau <i>Religious Belief</i> ...	77
2. Dimensi Praktek Agama atau <i>Religious Practice</i> ...	82
3. Dimensi Pengalaman Agama atau <i>Religious experience</i>	85
4. Dimensi Pengetahuan Agama atau <i>Religious Knowledge</i>	90

5. Dimensi Konsekuensi Agama atau <i>Religious Effect</i>	95
C. PERUBAHAN PERILAKU POLITIK KIAI DITENGAH PERKEMBANGAN NILAI-NILAI KEBERAGAMAAN.....	98
BAGIAN KEEMPAT ORIENTASI PERILAKU POLITIK KIAI ...	105
A. ORIENTASI PERILAKU POLITIK KIAI.....	105
1. Aktualisasi Ajaran Islam.....	105
2. Sebagai sarana Dakwah.....	107
3. Tanggung jawab Membangun Tatanan Sosial yang maju	109
4. Membangun Kemaslahatan Umat	112
5. Pengabdian Kepada Daerah dan Negara	115
DAFTAR PUSTAKA.....	119



BAGIAN PERTAMA

GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI

A. GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI PRA REFORMASI

Sejak tahun 1950-an, secara garis besar ada tiga kekuatan politik keagamaan dengan visi yang berbeda.¹ *Pertama*, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), hal tersebut tercatat dalam sejarah bahwa pada awal-awal kemerdekaan, umat Islam berhasil mendirikan sebuah partai yang bernuansa keIslaman dan diberi nama Masyumi. Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7-8 November 1945 yang merupakan hasil musyawarah para pemimpin umat Islam dalam sebuah kongres besar yang bertempat di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta.² Pendukung utama Partai Masyumi adalah Muhammadiyah dan NU dan hampir semua organisasi Islam Nasional maupun lokal mendukung Masyumi kecuali Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Tujuan dari didirikannya partai Masyumi adalah melanjutkan perjuangan dalam ranah politik yang bertujuan menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Pada masa itu umat Islam telah bersatu dan Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam.³

¹ Amin Mudzakir dalam <https://itnnujabar.or.id/tiga-kekuatan-politik-islam-di-jabar/> html. Diakses pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 pukul 20.00

² Bahtiar effendi, *Kiai Politik Politik Kiai*, (Bandung : MIZAN cet. I, rob'i Al tsani 1421) hlm. 35

³ A Syafii Maarif, *Islam dan Politik*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1996). hlm 31

Pada era 1950-an Partai Masyumi adalah salah satu partai Islam terbesar dari empat partai besar yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Ormas Muhammadiyah dan NU ikut bergabung didalamnya, dan dua organisasi Islam tersebut merupakan organisasi Islam terbesar dan mempunyai banyak masa bila dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya. NU dan Muhammadiyah merupakan dua sayap terbesar masyumi yang mewakili kalangan pesantren (kaum tradisional) dan kalangan reformis (pelajar). Oleh karena itu dapat dibayangkan apabila partai Masyumi tanpa dua organisasi Islam besar tersebut. Maka dapat dipastikan partai ini akan kehilangan sayap partainya⁴

Pada Tahun 1960 Partai Masyumi bubar dikarenakan pembagaian jabatan yang dianggap tidak seimbang, yaitu NU menginginkan agar kursi menteri agama ditunjuk dari NU. Namun Dewan Syura Masyumi malah menunjuk KH. Fakhri Usman sebagai Menteri Agama yang bukan dari golongan mereka yang pada akhirnya NU keluar dari partai Masyumi.⁵

Meskipun Masyumi bubar, namun para tokoh-tokohnya yang militan bertransformasi dan mendirikan organisasi baru yang gerakannya masih seirama dengan partai tersebut, seperti DDI (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang didirikan oleh Mohamad Natsir. Mereka merubah gerakan politik kepada gerakan dakwah dikarenakan adanya tekanan terhadap gerakan Islam politik yang dilakukan oleh Soeharto pada waktu itu. Masyumi pada awal berdirinya semua warga NU mendukungnya karna banyak kalangan NU yang bergabung dalam tentara perjuangan *Hisbullah* dan *Sabilillah* yang notabene dibentuk oleh Masyumi.

⁴ Dehar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta : Yayasan Risalah Press. 2003). hlm. 149

⁵ A Syafii Maarif, *Islam dan Politik*.....hlm. 31

Kedua, Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Setelah tertangkapnya pendiri DI/TII Kartosoewiryo, pengikut kelompok tersebut terpecah, dan salah satu dari pecahan kelompok tersebut yang termasyhur di daerah Tasikmalaya adalah kelompok KH. Khoer Affandi (Uwa Ajengan). Kemudian setelah keadaan perpolitik dan isu DI/TII semakin terlihat reda Ia mendirikan sebuah Pondok Pesantren di Tasikmalaya tepatnya di Kecamatan Manonjaya yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Selama masa kepemimpinan Soeharto (masa Orde Baru), Uwa Ajengan, tidak memperbolehkan para pengikutnya khususnya orang-orang kepercayaannya untuk terjun kedalam dunia politik. Ia dan orang-orang terdekatnya Justru malah mendedikasikan diri untuk memajukan pesantren dan fokus pada pengembangan pendidikan keislaman salafiyah (pengajian kitab kuning) dan tidak memperbolehkan adanya lembaga formal (modern) hingga saat ini.

Namun dua fatwa uwa ajengan tersebut di atas (tidak memperbolehkan berpolitik dan tidak memperbolehkan adanya lembaga pendidikan formal/sekolah) tidak lagi dianggap relevan oleh para penerus dan alumninya setelah Presiden Soeharto tumbang (pasca reformasi). Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa keluarga besar pesantren dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda mulai muncul menjadi kritikus terhadap kebijakan pemerintah bahkan ada juga yang menjadi pengurus partai politik. Lebih jauh lagi sebagian mereka menjadi pejabat legislatif dan eksekutif seperti KH. Asep Maosul Affandi yang menjadi anggota DPR RI dari PPP, KH. UU Ruzhanul Ulum sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dua periode dan akhirnya menjadi bupati Tasikmalaya dua periode hingga kini menjadi Wakil

gubernur Jawa Barat, KH. Sihabuddin menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, KH. Abdul Azid yang menjadi Dewan Syuro PKB Jawa Barat, dan lain-lain.

Sebagian keluarga besar pesantren dan alumni pun mendirikan pesantren dengan membuka lembaga formal (sekolah) seperti Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih yang didirikan oleh salah satu anak uwa ajengan yaitu Hj. Daliah yang mendirikan SMP dan SMP di lingkungan pesantren, Pondok Pesantren Ar-Ruzhan yang didirikan oleh Cucu dari uwa ajengan KH. UU Ruzhanul Ulum, dan lain-lain.

Ketiga, Nahdlatul Ulama, NU masuk dapat tersebar pengikutnya dan menjadi kekuatan politik setidaknya disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu mulai adanya hubungan kekerabatan antara para Kiai NU, kesamaan sanad keilmuan antara Kiai NU,⁶ dan adanya hubungan intelektual di kalangan Kiai-Kiai pesantren.

Konon bagi seorang santri yang layak untuk bermukim di kampung halamnya dan akan mendirikan Pondok Pesantrenn harus memenuhi syarat tertentu diantaranya adalah menimba ilmu di Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur seperti pesantren Tremas (Pacitan), Pesantren Bangkalan (Madura), pesantren Lirboyo (Kediri), dan pesantren Tebuireng (Jombang).⁷

Pada perkembangannya para Kiai yang telah bergabung dengan NU mulai menjalin hubungan secara kultural dengan

⁶ Sanad adalah silsilah keilmuan, atau dapat diartikan dengan transmisi kelimuan yang berasal dari guru-guru dan murid-murid yang meriwayatkan keilmuan tertentu. Sanad keilmuan dianggap sangat penting dalam kebenaran dan keberkahan ilmu yang didapat oleh para santri.

⁷ Nina Herlina L, dan kawan-kawan, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), hlm. 287

para Kiai-Kiai pendiri NU di tingkat pusat. Sejak itu pula para Kiai NU mulai mengikuti banyak acara-acara dan kongres-kongres hingga Mukhtar yang diselenggarakan oleh NU Pusat.⁸

Hal yang menjadi potensial bagi berkembangnya NU adalah karena keberadaan Kiai serta banyaknya pesantren-pesantren tradisional (salafiyah) baik pesantren besar, menengah dan pesantren kecil. Bahkan cikal bakal pembentukan jaringan tradisional Kiai NU juga dimulai dari Pondok Pesantren. Banyak para santri dari Kiai tertentu bahkan anak-anak Kiai tertentu juga dipondokkan ke pesantren-pesantren yang memiliki kedekatan dengan Kiai tersebut salah satunya kedekatan karena sama-sama anggota NU.⁹

Pola-pola yang dilakukan oleh Kiai tersebut di atas yaitu pola kekeluargaan dan kekerabatan secara kultural antara Kiai NU melahirkan sebuah ikatan emosional yang sangat kuat diantara Kiai-Kiai tersebut.¹⁰

Setelah NU memiliki basis yang kuat di beberapa pesantren, ia menjadi basis kekuatan politik yang amat mengakar di Indonesia. Hal tersebut terbukti Pada tahun 1960 Partai Masyumi dibekukan oleh pemerintah dan tinggal Partai Nahdlatul Ulama (PNU) sebagai satu-satunya partai Islam yang tersisa di Indonesia.¹¹

⁸ Majalah Berita NU, Daftar Pengunjung Kongres ke-15 di Kota Surabaya, 1940), hlm. 34

⁹ Hiroko Horikoshi. *Kiai dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, 1973), hlm. 199.

¹⁰ Buku kenang-kenangan Mukhtar ke XVII Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta, 12 s/d 17 Jumadil Tasni tahun 1379 H / atau 13 s/d 18 Desember 1959 M. (Jakarta : ARSIP PBNU. 1959)

¹¹ Bahtiar effendi, *Kiai Politik Kiai*, (Bandung : MIZAN cet. I, rob'i Al tsani 1421) hlm. 50

Kegagalan percobaan kudeta PKI pada 30 September 1965 memberikan konsekuensi bahwa Orde Lama akan hancur dan muncul pemerintahan Orde Baru. Banyak yang menganggap bahwa kehancuran Komunis akan memberikan peran penting PNU dalam membina umat dan memajukan Negara dan Islam akan kembali menjadi kekuatan politik sebagai mana terjadi pada masa demokrasi parlementer. Namun dengan taktik pemerintah yang didukung oleh militer dengan penundaan pemilu sampai tahun 1971 dan menjadikan Golkar sebagai organisasi politik yang mendukungnya, harapan tokoh Islam tidak menjadi kenyataan karena pada saat itu Golkar menang dengan memperoleh suara 62%.¹²

Pada masa Orde Baru, PNU bergabung dengan PPP. Ketika Orde Baru ingin menguasai kekuasaan, Soeharto membujuk Kiai untuk bergabung bersama Golkar. Sejak itulah Kiai ada yang di PPP dan ada juga yang di Golkar, dan hal itu semakin membuat perpecahan dikalangan umat Islam.¹³

Masyumi dan Darul Islam (DI) bergerak secara konstitusional di jalur formal, hingga memenangkan Pemilu pada tahun 1955, dan juga memenangkan pemilihan lokal tahun 1957. Cita-cita politik Masyumi, tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mendirikan “Negara Islam” secara formal.¹⁴ Adapun DI/TII lebih memilih pertempuran

¹² Widjanarko Puspoyo. *Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia tahun 1955-2009*. (Solo. Era Adicitra Intermedia. 2012). hlm. 125

¹³ Bahtiar effendi, *Kiai Politik Politik Kiai*,hlm. 70

¹⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan*

bersenjata untuk mendirikan Negara Islam tersebut. Meski dibubarkan dan ditumpas di era Soekarno, cita-cita Negara Islam tetap dipandang paling ideal. Bahkan pada tahun 1920-an sudah muncul Sarikat Islam (SI), sebelum berdirinya NU, Muhammadiyah, Persis, PUI dan PKI sekalipun. SI memiliki cita-cita sama bagaimana mewujudkan Negara Islam.

Namun pada masa pemerintahan Soeharto sumber kekuatan ekonomi politik Islam dikendalikan dan ditekan secara ketat oleh pemerintah. Terbukti Golkar selalu memenangkan pemilu bahkan secara berturut-turut, padahal PPP di daerah-daerah masih terlihat kuat hingga pada Pemilu tahun 1971 dan tahun 1977 PPP masih mempertahankan dominasinya, termasuk beberapa Bupati di daerah berasal dari PPP. Namun sejak para Kiai mulai pindah haluan beralih ke partai Golkar, kemenangan partai penguasa tersebut sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga pengaruh militer dalam perpolitikan semakin menguat.¹⁵

1. Kiai dan Wacana Negara Islam

Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru sebelum reformasi bahwa organisasi politik keagamaan Darul Islam (DI/TII) dianggap sebagai organisasi yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dianggap sebagai gerakan pemberontakan. C.A.O. van Nieuwenhuijze, seorang Sejarawan Belanda adalah orang yang paling pertama melacak asal usul gerakan Darul Islam, ia mengatakan bahwa Darul Islam ialah suatu gerakan Islam

Partai Jama'at-I Islam (Pakistan). (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 62-63

¹⁵ Amin Mudzakir dalam <https://ltnnujabar.or.id/tiga-kekuatan-politik-islam-di-jabar/> html. Diakses pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 pukul 20.00

politik yang muncul di Jawa barat khususnya di Tasikmalaya yang diketuai oleh salah seorang Kiai. Namun gerakan yang berawal dari Kiai tersebut akhirnya sampai kepada tangan politikus pergerakan Muslim yaitu Kartosuwiryo.¹⁶

Seorang sejarawan peneliti Islam, budaya, dan politik Hiroko Horikoshi juga sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Van Nieuwenhuijze ia menganalisis dan menyimpulkan bahwa Kiai yang dimaksud oleh Van Nieuwenhuijze ialah Kiai Yusuf Tausiri. Namun Horikoshi menggambarkan seorang Kiai Yusuf sebagai tokoh pemimpin kerohanian gerakan Darul Islam.¹⁷

Kiai Yusuf¹⁸ merupakan pemimpin dan tokoh utama yang memprakarsai berdirinya negara Islam di Indonesia. Belau

¹⁶ . C.A.O. Van Nieuwenhuijze. *Aspects Of Islam In Post Colonial Indonesia*. (Belanda : E.J. Brill, 1958). hlm. 167

¹⁷ Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: LP3ES. 1987). hlm. 164

¹⁸ Kiai Yusuf Tausiri merupakan pendiri Masjid serta Pondok Pesantren Darussalam di Wanaraja, Garut pada tahun 1929. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan Islam, KH Yusuf Tausiri juga memantapkan diri terlibat dalam perlawanan penjajahan hingga terbentuknya Laskar Darussalam. Ketika Belanda kembali ke tanah air dalam agresi militernya dan lantas menguasai Wanaraja, Yusuf bersama laskarnya hijrah ke utara Wanaraja, tepatnya di Pesantren Cipari, sebuah pesantren di sebelah utara Wanaraja. Sejak masa pra kemerdekaan KH Yusuf telah lama mengenal Kartosuwiryo di Sarikat Islam (SI). Persahabatan itu sudah terjalin lama. Kiai Yusuf mengenal Kartosoewirjo ketika menjadi anggota Dewan Sentral Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada 1931-1938. Yusuf pun menjadi salah seorang Penasehat Kartosoewirjo. Keluarga keduanya juga bahu-membahu dalam perjuangan melawan penjajah di Jawa Barat. Istri Kartosoewirjo, Dewi Siti Kalsum, bergaul akrab dengan adik-adik perempuan Kiai Yusuf yang memimpin seksi wanita Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Lihat “Negara Setengah Hati”, *Majalah Tempo* No. 3925 (Agustus 2010) hlm. 76. Lihat juga Pinardi. *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo*, (Jakarta : PT Badan Penerbit Aryaguna. 1964). hlm. 51

juga yang mempengaruhi para Kiai lain juga masyarakat untuk mengikuti doktrinnya. Bahkan pada masa revolusi dan agresi militer belanda, ia membangun Laskar Darussalam yang menjadi cikal bakal berdirinya Darul Islam yang mendoktrin bahwa semua umat Islam harus meyakini sepenuh hari untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan segenap aturannya wajib dilaksanakan.

Kiai Yusuf kenal dekat dengan Kartosuwiryo sehingga pada tahun 1931-1938 beliau diangkat menjadi anggota Dewan Sentral PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Mereka berdua saling membantu dan bahu membahu melawan kekejaman penjajah khususnya penjajah di Jawa Barat. Istri Kartosuwiryo, Dewi Siti Kalsum, mulai akrab dengan adik-adik perempuan Kiai Yusuf yang memimpin para wanita-wanita dalam organisasi GPIIG (Gerakan Pemuda Islam Indonesia Garut). Setelah sekian lama Kartosuwiryo dan Kiai Yusuf mejalin persahabatan, pada suatu ketika Kartosuwiryo meminta Kiai Yusuf untuk bersama-sama dengannya mendeklarasikan berdirinya negara Islam pada tahun 1945. Tetapi Kiai Yusuf menolak dengan tegas. Beliau mengatakan bahwa Pada tanggal 15 Agustus disaat Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Kartosuwiryo memintanya untuk memproklamasikan (NII) Negara Islam Indonesia, tetapi beliau menolak secara terang-terangan.¹⁹

Namun kartosuwiryo tetap bersi kukuh untuk memproklamirkan NII. Oleh karena itu disebutkan dalam versi lain mengenai awal berdirinya gerakan Darul Islam adalah pada hari ketika menyerahnya Jepang dari Indonesia

¹⁹ Pinardi. *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo*, (Jakarta : PT Badan Penerbit Aryaguna. 1964). hlm. 51

dan diproklamirkan oleh Kartosuwiryo.²⁰ Sedangkan dalam versi lain juga, Alers menjelaskan bahwa Kartosuwiryo memproklamasikan DI/NII sejak tanggal 14 Agustus 1945, namun menarik kembali proklamasinya setelah mendengar bahwa Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.²¹ Namun penjelasan Alers diragukan oleh Van Dijk. Ia menjelaskan bahwa tanggal 14 Agustus adalah satu hari sebelum Jepang mengatakan menyerah dalam perang dunia II dan mengenai tempat proklamasi pun tidak jelas, akhirnya pendapat Alers tersebut diragukan kebenarannya.²²

Cornelis Van Dijk menjelaskan bahwa tidak benar apabila Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Jakarta. Karena tidak mungkin Jepang mengizinkannya. Dan apabila Kartosuwiryo benar telah memproklamasikan NII di Jakarta, sudah barang tentu akan diketahui banyak orang, dan buktinya tidak banyak orang yang tahu, ini mengindikasikan bahwa proklamasi tersebut bisa jadi dilakukan dalam pertemuan kecil dan sangat rahasia.²³

Melihat dari sejarah tersebut di atas, terdapat dua versi mengenai kapan diproklamasikan NII. Ada yang mengatakan pada tanggal 14 Agustus dan ada yang mengatakan pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun yang menjadi sorotan adalah bahwa keduanya dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebab proklamasi terjadi pada

²⁰ C Van Dijk . *Darul Islam ; Sebuah Pemberontakan*. (Jakarta : PT, Grafiti Pers, 1983). hlm. 152

²¹ Alers. tj. (tt. tpn. 1956). hlm. 3.

²² Cornelis Van Dijk . *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*.hlm. 154

²³ Cornelis Van Dijk . *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*.hlm. 156

tanggal 17 Agustus 1945. Namun menurut para pengikut Kartosuwiryo, berdasarkan dua versi sejarah inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibuat oleh Soekarno.

Al Chaidar mengatakan dalam bukunya *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia* bahwa teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 adalah salinan dari teks yang disiapkan oleh kartosuwiryo untuk Kiai Yusuf pada 14 Agustus 1945.²⁴

Kemudian muncul juga versi sejarah yang berbeda, yang menjelaskan bahwa Kartosuwiryo belum pernah memproklamasikan negara apapun pada tahun 1945. Buktinya, pada awal tahun 1948, Kartosuwiryo untuk kesekian kalinya mendatangi Kiai Yusuf Tauziri untuk kedua kalinya yang pada waktu itu beliau sebagai pendiri Pondok Pesantren Darussalam Wanaraja Garut untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII). Namun seperti dengan kejadian sebelumnya Kiai Yusuf menolak tegas.²⁵

²⁴ Al Chaidar. *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia (NII) S.M. Kartosoewirjo : Fakta dan Data Sejarah Darul Islam (DI)*. (Jakarta : Darul Falah. 1999). hlm. 35

²⁵ Penolakan tersebut berawal dari perbedaan paham KH Yusuf dan Kartosoewirjo yang bermula pada awal 1940, Kartosoewirjo mengusulkan lembaga Suffah dalam kongres Komite Pembela Kebenaran. Komite ini merupakan pecahan PSII yang memilih jalan nonkooperatif dengan Belanda. Dalam kongres itu, Kartosoewirjo memperkenalkan konsep hijrah, sama pengertiannya dengan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sementara Kiai Yusuf berpendapat belum saatnya hijrah total. Alasannya, persiapan belum matang. Kartosoewirjo lalu mendirikan lembaga Suffah pada Maret 1940. Kiai Yusuf sebenarnya secara tak langsung masih mendukung Suffah. Pada awal pendiriannya, ia mengirimkan dua anak laki-laki sebagai pengajar. Ia pun memasukkan keponakannya sebagai pelajar. Pada Februari 1948, Kartosoewirjo mengadakan Konferensi Darul Islam (DI/NII) pertama di

Kartosuwiryo memanfaatkan keadaan umat di Indonesia yang pada waktu itu tahun 1948 sedang terpecah, hal tersebut dianggap sangat mendukung untuk lahirnya sebuah pemerintahan yang berdaulat setelah terjadinya perjanjian

Cisayong, Tasikmalaya. Pertemuan itu membentuk struktur organisasi gerakan perlawanan, yang dipertegas dalam konferensi kedua di Cipeundeuy, Cirebon. Kartosoewirjo makin mematangkan gagasan Negara Islam yang terpisah dari republik ini. Kiai Yusuf dan pengikutnya menganggap gagasan mendirikan Negara Islam dengan meninggalkan Republik terlalu jauh. Hingga akhirnya Pesantren Darussalam dianggap melawan Imam Kartosoewirjo. Apalagi Pesantren Darussalam juga dijadikan tempat berlindung penduduk yang tak mau memberikan hartanya kepada tentara Darul Islam (DI/NII). Pesantren pun menjadi target dan 1949-1958, pasukan Darul Islam (DI/NII), menyerang Desa Cipari lebih dari 46 kali. Kartosoewirjo berniat menghabisi Kiai Yusuf sekeluarga serta pengikutnya dengan serangan besar-besaran pada 17 April 1952. Dalam penyerbuan 17 April 1952 itu, empat pengawal pesantren dan tujuh penduduk Cipari tewas. Kiai Bustomi, kakak ipar Kiai Yusuf, juga menjadi korban. Ia ditembak ketika hendak berlindung di Masjid. Namun, peristiwa pengepungan di Desa Cipari tersebut, tak membuyarkan Pesantren Darussalam. Kecintaan kepada Republik Indonesia, justru membuat Laskar Darussalam memilih untuk memperkuat Barisan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Itulah mengapa KH Yusuf Tauziri identik dengan Laskar Darussalam, tak dapat dipisahkan, bagai ikan dengan air. Dan mereka tak terpisahkan dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia. Pada saat terjadi pemberontakan NII/DI, Darussalam yang memang dijadikan benteng pertahanan oleh TNI, menjadi sasaran penyerangan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan kawan-kawan. Jejak berondongan peluru masih terekam jelas dan menjadi tapak sejarah akan lahirnya perjuangan mempertahankan Republik ini. Nama Yusuf Tauziri pun jelas tertoreh di dalam sejarah TNI, khususnya Kodam Siliwangi, sebagai seorang tokoh pejuang yang berperan serta atas lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Kiai Yusuf Tauziri wafat di Garut pada 1982. Makamnya di lingkungan Pesantren Darussalam, Wanaraja, Garut, kampung halamannya. Lihat Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Lihat *Propinsi Jawa Barat* (Jakarta : Kementrian Penerangan. 1953). hlm. 216

Renville. Yang pada waktu itu juga Republik Indonesia kehilangan banyak wilayah kekuasaan. Belanda hanya mengakui beberapa daerah saja yang termasuk kedalam wilayah Republik Indonesia yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera tidak dengan Jawa Barat. Hal itulah yang menjadi alasan kuat Kartosuwiryo meminta kembali kepada Kiai Yusuf untuk memproklamirkan negara Islam Indonesia di Jawa Barat.

Akibat dari perjanjian Renville salah satunya adalah pasukan Indonesia dari wilayah Jawa Barat dan Tasikmalaya ditarik mundur dan diarahkan menuju ke wilayah Jawa Tengah. Sebab perundingan tersebut hanya berlaku antara Pemerintah Republik Indoneis dan Pemerintah Belanda, maka pasukan kemerdekaan yang tergabung dalam Divisi Siliwangi harus mematuhi perintah pemerintah Indonesia untuk menuju Jawa Tengah. Namun pasukan gerilya Islam di Jawa Barat yaitu *Sabilillah* dan *Hizbullah* yang tidak tergabung dalam Tentara Republik Indonesia menolak mematuhi perjanjian Renville.

George MT Kahin menjelaskan bahwa sekitar 35.000 pasukan Republik dalam waktu dua bulan ditarik mundur. Dan sekitar 4.000 pasukan yang sebagian besar adalah pasukan gerilya Islam *Hizbullah Masyumi* memilih tetap tinggal di tempat.²⁶ setelah perjanjian Renville selesai, komandan pasukan *Sabilillah* yaitu Oni Qital yang sedang menetap di daerah hutan di pegunungan di Tasikmalaya tepatnya di kecamatan Cisayong Tasikmalaya, menyelenggarakan sebuah pertemuan tertutup dengan Kartosuwiryo untuk membahas situasi politik dan militer

²⁶ George McTurnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. (Amerika : Cornell University. 1970). hlm. 234.

yang terjadi kala itu. Dan keduanya sepakat untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar lagi. Pada akhirnya pertemuan tersebut dapat terlaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan Kecamatan Cisayong (Sekarang wilayah Kota Tasikmalaya), sebuah desa di segitiga kawasan Tasikmalaya-Malangbong-Garut.

Dalam pertemuan itu hadir para pemimpin ormas Islam, seperti GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dan beberapa pemimpin *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Hasil dari pertemuan itu adalah Masyumi di Jawa Barat harus dibekukan, dan segera membentuk basis pemerintah daerah di Jawa Barat dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII) yang bermarkas di Gunung Cupu, Ciamis.

Lokasi pertemuan Cipeundeuy, sebagai lanjutan dari Konferensi Cisayong. Pada awal Maret berlangsung suatu konferensi lanjutan. Kali ini digelar di Cipeundeuy, sebuah desa di selatan Malangbong, Garut. Di sini dikukuhkan keputusan-keputusan yang dicapai di Pangwedusan dan bersiap menciptakan negara Islam jika Belanda melanjutkan rencananya membentuk negara boneka di Jawa Barat yaitu Negara Pasundan.

Kartosuwiryo melakukan penyendirian dan bertiarap selama kurang lebih dari satu tahun. Ternyata hal tersebut ia rencanakan untuk menyusun kekuatan dan akan secara terang-terangan menolak kekuasaan Pemerintah Republik dan secara bersamaan dan secara resmi akan memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII). Selanjutnya, ia juga membuat agenda untuk merubah struktur organisasinya agar lebih sempurna untuk menggalang kekuatan yang lebih kuat. Pada suatu konferensi yang diadakan di Cijoho pada 1 Mei 1948 dipersiapkan suatu rancangan konstitusi yang kemudian diselesaikan sekitar

bulan Agustus.

Pada konferensi itu juga ia membentuk Dewan Imamah atau Dewan Kabinet, dan Dewan Fatwa atau Dewan Penasihat. Dewan Imamah terdiri presiden atau Imam dan merangkap Menteri Luar Negeri. Yaitu Kartosuwiryo, Menteri Pertahanan oleh Kamran, Wakil Menteri Pertahanan oleh Oni Qital, Menteri Dalam Negeri oleh Sanusi Partawijaya, dan Menteri Penerangan oleh Toha Arsyad.²⁷

Negara Islam Indonesia (NII) akhirnya diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Proklamasi dilakukan di Desa Cisampang, Distrik Cisayong yang kerap disebut dalam kiasan sebagai “Madinah”. Dalam mukadimah proklamasi, disebutkan bahwa perundingan Renville 1948 yang mengakibatkan bangkitnya masyarakat Islam, dan disebut sebagai titik tolak berubahnya perjuangan untuk kemerdekaan dari revolusi nasional menjadi revolusi Islam.²⁸

Dari pemaparan sejarah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tasikmalaya merupakan epicentrum munculnya gerakan politik keagamaan yang menginginkan terbentuknya Negara Islam di Indonesia. Maka tidak heran ketika para Kiai di Tasikmalaya hingga pasca reformasi banyak yang menyuarakan tentang ide-ide syariat Islam dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat dan dalam tatanan pemerintahan di Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya beberapa organisasi-organisasi yang memiliki kedekatan pemikiran dan cita-cita dengan DI/NII sebelumnya.

²⁷ Pinardi *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo*, (Jakarta : PT Badan Penerbit Aryaguna. 19964). hlm. 81

²⁸ Pinardi *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo* .hlm. 74-76

B. GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN KIAI PASCA REFORMASI

1. Gerakan Islam Politik Pasca Reformasi

Gerakan politik keagamaan Islam yang bermunculan pasca tumbanganya rezim Orde Baru dapat dikategorikan kedalam dua tipe: *Pertama*, Gerakan yang bersifat Struktural seperti Partai Islam, yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nadlatul Ummat (PNU), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi, serta partai-partai Islam lainnya yang saat itu juga muncul dipermukaan selain daripada PPP yang menjadi partai Islam pendahulu.

Perpolitikan pasca reformasi sangat kental dengan gerakan Islam politik, munculnya partai-partai Islam di atas juga menjadi penyebab islam terkotak-kotakkan dalam partai politik. Misalkan dulu mayoritas Kiai mendukung PPP, namun ketika muncul partai-parai Islam baru Kiai merapat masuk ke partai yang dianggap sesuai dengan ideologi keagamaannya masing-masing. Misalkan mayoritas Kiai NU masuk PKB, tokoh Muhammadiyah masuk PAN, tokoh Persis masuk PBB, sebagian Kiai masuk PBR dan PK. Maka secara pragmatis PPP dirugikan bahkan Islampun dirugikan dengan suara umat islam yang terpecah.

Situasi politik lokal pasca reformasi pun sangat mendukung bagi tercapainya tujuan dari pergerakan islam politik, yaitu memasukan syariat Islam menjadi peraturan dalam hukum positif. Kemenangan beberapa partai Islam dalam pemilu pasca reformasi tahun 1999 seperti PPP, PKB, PBB, dan PAN menjadi cikal bakal berkembangnya Islam politik. Kemudian kemenangan besar partai-partai Islam ini dimanfaatkan oleh para Kiai sebagai kekuatan politik untuk

meluluskan gerakan formalisasi syariah yaitu dengan menerapkan peraturan daerah syariah yang kemudian turut juga bergabung dalam gerakan mereka organisasi masa keagamaan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) sebagai gerakan sosial keagamaan untuk mendorong pemerintah agar memasukkan peraturan-peraturan bernuansa Islam kedalam peraturan daerah (perda) di berbagai daerah di Indonesia.

Kedua, Gerakan yang bersifat kultural, seperti : Brigade Taliban (BT), FPI (Front Pembela Islam), FKASW (Forum Komunikasi Alussunah wal Jamaah) atau lebih terkenal dengan Laskar *Jihad Ahlussunah wal Jamaah*, IM (Ikhwanul Muslimin), HTI (Hizbut Tarir Indonesia), HMMAK (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan lain sebagainya.

Namun gerakan-gerakan keagamaan kultural tersebut di atas terlihat sangat berbeda dengan gerakan Islam mainstream yang sudah lama berdiri seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan lain-lain. Gerakan mereka dapat dikategorikan sebagai gerakan diluar arus utama atau keluar dari kerangka mainstream mayoritas gerakan keislaman yang lainnya karena misi mereka tidak lagi membangun tatanan kemandirian masyarakat yang kuat tetapi lebih kepada ingin merekonstruksi dan mendekonstruksi budaya-budaya yang sudah lama bertahan dikalangan organisasi masa umat Islam sebelumnya. Oleh Karen itu fenomena munculnya gerakan keagamaan baru di Indonesia dalam kerangka gerakan keagamaan Islam sering disebut sebagai Gerakan keagamaan baru (*New Religious Movement*) atau Gerakan Islam Baru (*new Islamic*

movement).²⁹

Seperti kita ketahui gerakan-gerakan Islam seperti Gerakan Tarbiyah, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad dan lain-lain, juga merepresentasikan gerakan keagamaan Islam baru di Indonesia Pasca Reformasi. Organisasi Masa keagamaan Islam Baru ini memiliki dasar ideologi, gerakan dan pemikiran yang sangat berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya.

Oleh karena itu mereka dapat dikatakan sebagai gerakan Islam puritan, hal tersebut dikarenakan gerakan mereka memiliki militansi yang sangat kuat, cara berfikir yang skripturalis, radikal, eksklusif, dan konservatif.³⁰ Ormas-

²⁹ Istilah gerakan keagamaan baru ini lahir dari para sarjana Barat pada tahun 1970-an sebagai istilah alternatif untuk menggantikan istilah lama *kultus*, yang dalam perdebatan tentang kultus pada 1970-an memperoleh konotasi menghina, dan kemudian digunakan dengan sekenanya oleh para kritikus awam untuk menghina keyakinan-keyakinan yang ajaran-ajarannya dianggap aneh atau sesat. (*Introvigne, Massimo (June 15, 2001). "The Future of Religion and the Future of New Religions". Diakses tanggal 17 November 2020*). Sejumlah pakar, khususnya dalam bidang sosiologi agama, menggunakan istilah "gerakan agama baru" untuk melukiskan agama-agama non-arus utama, sementara yang lainnya menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada agama-agama yang tidak berbahaya sementara istilah "kultus" untuk kelompok-kelompok – baik agama, psikoterapeutik, politik ataupun komersial – yang mereka yakini sangat manipulatif dan eksploitatif. (lihat Langone, Michael D. *Secular and Religious Critiques of Cults: Complementary Visions, Not Irresolvable Conflicts. Diakses tanggal 17 November 2020*)

³⁰ Puritanisme agama, dia lahir sebagai kontra diskursus, terutama terhadap modernitas. Faktor sosial, selalu menjadi pertimbangan untuk memahami kehadiran puritanisme. Betapapun begitu, tidak bisa dipungkiri dia juga sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri (inward oriented). Penolakannya terhadap Barat dan produk budayanya. Ia memiliki

ormas baru tersebut sebetulnya memiliki jargon yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya mereka mempunyai cita-cita, visi dan misi yang sama yaitu berusaha membentuk “Negara Islam” (*dawlah Islamiyah*) dan selalu berusaha dan bersikeras memberlakukan syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup masyarakat, maupun lingkup negara.³¹ Hal tersebut sejalan dengan cita-cita organisasi pendahulunya yaitu DI/TII/NII sebagai epicentrum gerakan pendirian Negara Islam di Indonesia.

Meskipun keadaan sosial politik yang berbeda antara masa DI/NII dengan masa reformasi, gerakan Islam baru ini memiliki gagasan yang sama yaitu penerapan syari’at Islam secara formal. Seperti halnya HTI berupaya menerapkan syari’at Islam dan menyodorkan agar sistem khilafah yang pernah diterapkan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin dan menganggap bahwa faham nasionalisme adalah faham barat dan bukan dari Islam bahkan mereka mengatakan bahwa demokrasi adalah produk kafir dan tidak layak dilaksanakan di Negara Islam khususnya yang mayoritas Islam yaitu di Indonesia. Akhirnya isu-isu faham tersebut mendapat respon cukup masiv dari kalangan umat muslim khususnya para elit-elit ormas Islam yang mendukung faham nasionalisme dan demokrasi seperti Nahdlatul Ulama (NU)

karakter yang literalis dan tekstualis atau skripturalis (selalu berpegang teguh kepada teks-teks agama dan tidak menerima penafsiran yang lebih relevan), radikal (keras dalam berfikir dan bertindak), eksklusif (menganggap pendapatnya paling benar dan sulit untuk menerima perbedaan pandangan, dan konservatif (memiliki paradigm berfikir yang masih kuno/lama padahal hal tersebut tidak lagi relevan di masa sekarang)

³¹ Imdadun R. Arus Baru *Islam Radikal : Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesi* (Jakarta : Erlangga. 2005). hlm. 14

dan Muhammadiyah.

Munculnya beberapa Gerakan Islam baru (*New Islamic Movement*) pasca reformasi, setidaknya ditenggarai oleh beberapa faktor, *Pertama*, semangat keislaman yang membara dari kalangan tokoh-tokoh agama yang selama rezim Orde Baru tidak bisa menyuarakan pendapatnya tentang idiologi keislamannya. *Kedua*, Mereka merasa bahwa Indonesia sebagai negara yagn mayoritas penduduknya beragama Islam harus memiliki ciri khas keislaman yang kuat dari masyarakatnya sendiri. *Ketiga*, Maraknya perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang dari syariat dan tidak merepresentasikan masyarakat yang Islami. *Keempat*, Adanya cita-cita yang tinggi mewujudkan Indonesia yang Religius-Islami melalui perda syariah. Oleh karena itu, cita-cita tersebut menjadikan mereka membuat benteng-benteng kecil untuk melancarkan misinya melalui Ormas-ormas yang dianggap mampu mewakili dan menyuarakan hasrat politik dan cita-cita mereka. Dan yang paling penting lagi adalah faktor *Kelima*, yaitu terindikasi bahwa mereka secara idiologi memiliki idiologi yang kuat tentang konsep “Negara Islam” yang mereka impi-impikan semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Organisasi Masa Islam Pasca reformasi dapat terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: *Pertama*, Organisasi masa dakwah, yaitu ormas-ormas besar yang skala nasional, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. *Kedua*, Ormas *amar ma'ruf nahyi mungkar* yang hanya bersifat lokal. Agenda yang mereka lakukan adalah agenda pemberantasan kemaksiatan, oleh Karena itu mereka sering mengadakan sweeping ke tempat atau wilayah yang yang sering memperdagangkan minuman

keras dan tempat prostitusi.³²

Meskipun gerakan mereka bersifat kultural dan non formal, namun mereka mengupayakan gerakan politik sebagai upaya penegakan syariat Islam pasca reformasi. Salah satu contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Brigade Tholiban (BT) dan juga Front Pem bela Islam (FPI) yang mendukung penuh Tatang Farhanul Hakim sebagai ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi bupati pada tahun 2001 yang sebelumnya Tatang tiga kali berturut-turut menjadi anggota DPRD Tasikmalaya, yakni periode 1992-1997, 1997-1999 dan 1999-2001. Setelah Tatang menjadi bupati, BT dan FPI mendesak bupati untuk memasukkan gagasan Syariat Islam ke dalam renstra³³ (rencana strategis) Kabupaten Tasikmalaya yang pada waktu itu juga didukung oleh partai-partai Islam. Upaya politik mereka berhasil dengan lahirnya renstra Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005 yang dijabarkan dalam Perda N o. 13 tahun 2001 diutarakan bahwa visi Kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten yang “ *Religius Islami*” bahkan Bupati Tatang Farhanul Hakim mengeluarkan surat edaran No.451 tahun 2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat Tasikmalaya.

Contoh lain juga ada di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya mulai menerapkan nilai-nilai keislaman pada sistem tata nilai Kota Tasikmalaya pada periode walikota Syarif Hidayat dengan lahirnya Perda No. 12/2009 tentang

³² Amin Mudzakkir. *Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol 6 2017. hlm. 64

³³ Rencana Strategi (Renstra) bagi daerah otonom, menurut PP. No. 108 tahun 2000 berfungsi sebagai pedoman kepada daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra.

“pembangunan tata nilai kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya”.³⁴ Perda ini ditandatangani oleh Walikota Syarif Hidayat, Walikota Tasikmalaya periode itu, yang berasal dari PPP. Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri di bawah Menteri Gamawan Fauzi ketika itu sedang giat-giatnya merevisi perda-perda bermasalah. Dia memanggil walikota ke Jakarta untuk merundingkan perda tersebut. Dia meminta perda tersebut direvisi. Kata-kata “Islam” diminta dihapus karena suatu kebijakan publik seharusnya berlaku bagi semua, bukan hanya penduduk Muslim. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, lahir Perda No. 7/2004 yang merupakan pengganti Perda No. 12/2009. Kata-kata “Islam” telah dihapus. Judulnya digantungkan menjadi Perda tentang *“tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya”*. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang menyebutkan “Islam” secara khusus tidak dijumpai lagi, tetapi setelah diselidiki secara seksama substansinya kurang lebih sama. Tidak lama kemudian, melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 467.2/Kep.147-Kesbangpol/2005,

³⁴ Di samping itu, gagasan penerapan syari’at Islam diaplikasikan di tingkat kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pertama, Perda No 01 Tahun 2000 seri C dibuat untuk mengatur masalah Prostitusi. Kedua, Perda No. 02 Tahun 2000 Seri C isinya mengatur tentang Pemberantasan Pelacuran. Ketiga, Himbauan Bupati Nomor 556.3/SH/03/Sos/2001 tentang jadwal berenang antara laki-laki dan perempuan agar tidak bersamaan waktunya, serta pendirian musholla dan perlengkapan ibadah di lingkungan kolam renang. Keempat, Keputusan Bupati Nomor 421.2/Kep.326A/Sos/2001 bahwa anak usia pra sekolah harus memiliki kemampuan baca al-Qur’an. Selain itu siswa SD dan SLTA yang beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti sekolah Diniyyah (agama), dan kelima, Surat Edaran Bupati Nomor 451/SE/04/Sos/2001 yang menganjurkan bagi siswi SD, SLTA, SMU, Lembaga Pendidikan Kursus, dan PT yang beragama Islam agar mengenakan seragam dengan ketentuan yang menutup aurat.

Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, membentuk “tim koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Tasikmalaya”.³⁵

Dari beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Islam politik pasca reformasi sangat kentara dengan kemenangan partai-partai Islam pada pemilu legislatif dan kemenangan pemilukada Bupati dan Walikota dari PPP, serta diikuti dengan munculnya gerakan-gerakan keagamaan Islam seperti BT, FPI, MMI dan lain-lain. Kedua kekuatan tersebut bersatu dalam menyuarakan Islam politik di Tasikmalaya, Gerakan non formal seperti BT, FPI, MMI merapat dengan para petinggi partai, dan partai diuntungkan dengan mendapatkan dukungan massa dari gerakan tersebut yang sangat militan. Sehingga kolaborasi ini menjadi kekuatan hebat untuk menjalankan misi penegakan syariat Islam di Tasikmalaya pasca reformasi.

Namun setelah renstra dan sistem tata nilai itu berjalan selama beberapa tahun, keadaan sosial, budaya, politik masyarakat Tasikmalaya mulai berubah. Mereka tidak lagi peduli dengan perda-perda syariat yang diterapkan oleh pemerintah. Karena banyak terjadi kritikan-kritikan dan perlawanan dari aktifis-aktifis HAM dan mahasiswa yang menyayangkan sikap pemerintah yang mengatur masalah privat keagamaan masyarakat melalui peraturan positif. Seperti kritikan dari salah seorang aktifis HAM dari kelompok Setara untuk Demokrasi dan Perdamaian Bonar Naipospos. Ia menganggap rencana pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk menerapkan Perda Syariah yang antara lain mewajibkan

³⁵ Amin Mudzakkir. *Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol 6 2017. hlm. 66

pemakaian jilbab bagi perempuan muslim di wilayah hukum Tasikmalaya sebagai sesuatu yang inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara Indonesia. Bahwa konstitusi mengatakan sumber segala hukum adalah Pancasila. Jika ada UU dan Perda yang mengacu pada agama tertentu meskipun agama itu mayoritas, tetap jelas dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Bahkan Diantara kelompok yang kontra perda syariat juga muncul dari sebagian golongan santri, yang berasal dari Ansor, PMII, Pesantren, aktivis mahasiswa, NU, Muhammadiyah, LSM HAM seperti LKaHAM³⁶ dan lain-lain. Mereka terus memberikan kritikan baik melalui media-media, spanduk-spanduk, dan lain-lain. Kelompok ini lebih kritis dalam menafsirkan syari'at Islam. Syari'at Islam menurut kelompok ini lebih bersifat substansial atau kontekstual dari pada formal atau tekstual. Menurut mereka, Islam harus bersifat inklusif, menjadikan semua bagian dalam masyarakat sebagai keberagaman yang tidak bisa dipisahkan. Mereka juga lebih melihat bahwa penerapan syari'at lebih kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.³⁷

³⁶ LKaHAM (Lingkar Kajian agama dan Hak Asasi Manusia) merupakan LSM yang memiliki pemikiran moderat termasuk dalam menyikapi adanya gerakan formalisasi syari'at Islam melalui Peraturan Daerah Tasikmalaya. Selain membuat counter legal drafting terhadap visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya, bekerja sama dengan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta, LKaHAM menerbitkan bulletin LINGKAR untuk mengcounter wacana formalisasi syari'at Islam

³⁷ Lindra Darnera, *Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya*. Jurnal SUPERMASI HUKUM. Vol. 4. No. 1. Juni 2015. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2015). hlm. 123-133

Pada akhirnya perda-perda tersebut kurang efektif dalam implementasinya di masyarakat dan mulai terkukus oleh perubahan sosial-politik-budaya yang berkembang di masyarakat. Hingga kini isus-isu perda syariat tersebut seperti hilang dimakan zaman. Perilaku politik para Kiai kini mengalami perubahan yang signifikan, perilaku dan gerakan politik mereka sekarang lebih berorientasi kepada bagaimana mentransformasikan nilai-nilai Islam yang luhur kedalam dunia sosial, politik dan budaya sehingga dengan cara itulah masyarakat akan lebih menerima daripada memformalkan nilai-nilai Islam kedalam hukum positif. Suara-suara yang menyerukan perlunya Perda syari'at, ternyata hanya terdengar ketika masa pemilihan umum saja yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Setelah itu, wacana tentang perda syari'at menjadi hilang dengan sendirinya.³⁸

Bagi orang-orang yang menolak perda syariat menganggap bahwa Islam adalah sumber nilai dan norma yang harus dijadikan pijakan dan landasan dalam menjalankan kehidupan, substansi ajarannyalah yang dianggap penting bukan kepada simbol-simbol agama yang dimunculkan kedalam ranah publik apalagi dalam ranah politik.

Oleh karena itu beberapa kiai berpendapat bahwa berpolitik itu adalah ilmu yang harus berlandaskan pada nilai-nilai yang baik, luhur dan meneruskan pada kehidupan yang lebih baik, yaitu ajaran agama islam, dan memilih nilai-nilai islamnya yang luhur lebih baik daripada simbol-simbol agamanya (yang hanya sekedar identitas). Maka dalam

³⁸ Lindra Darnera, *Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya*. Jurnal SUPERMASI HUKUM. Vol. 4. No. 1. Juni 2015. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2015). hlm. 139

perilaku politik Kiai lebih cenderung tidak melihat status muslim atau bukan muslim dalam perpolitikan pemilihan pemimpin daerah, namun bagaimana para pemimpin itu menerapkan nilai-nilai yang islami dalam kepemimpinannya. Bahkan ironisnya banyak para pemimpin muslim yang tidak memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai islam yang diajarkan dalam ideologi Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga kepemimpinannya tidak bernuansa islam, namun ada pemimpin non muslim yang justru kepemimpinannya mengandung nilai-nilai keislaman secara tidak langsung.

Maka dapat ditegaskan bahwa agama itu adalah basis dari aturan kehidupan maka harus menjadi acuan utama bahkan acuan dalam berpolitik. Tetapi tentu bukan berarti politik di indonesia harus politik islam karena nilai-nilai islam itu justeru sudah ada dalam sila-sila pancasila, dalam kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan sosial, pendidikan yang bangsa indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai substansial agama wajib menjadi pedoman kehidupan kita termasuk dalam politik. Oleh karena itu perilaku politik Kiai harus politik adiluhung yang berpedoman kepada agama yaitu politik yang ideal, politik yang memakai konsep benar salah. Tidak melulu memakai konsep menang kalah. Apabila politisi hanya berfikir menang kalah maka agama tidak akan menjadi tujuan dan agama tidak akan menjadi jalan berpolitik.

Seorang penguasa yang melandaskan agama dalam berkuasa pastilah tidak menjadikan kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan agamanya, menjadikannya landasan dalam membuat segala kebijakan dan keputusan, karena agama adalah penuntun bagi seluruh umat didunia. Jadi alangkah baiknya jika seorang penguasa menjadikan agama sebagai landasan dalam berpolitik, karena agama adalah sumber

pedoman dari sang Pencipta (Allah) yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hal ini jelas Islam, jika landasan dalam berpolitik kita adalah syariat Islam maka sudah bisa dipastikan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam berpolitik dapat ditemukan solusinya karena sumber pedomannya dibuat oleh yang maha pencipta, maha pandai, maha bijaksana, dan maha segalanya. Tetapi itu semua tergantung dari dalam diri masing-masing penguasa yang melandaskannya, tetap harus terlebih dahulu melandaskan jiwa, moral, spiritual, dan karakternya terlebih dahulu dengan agama yang baik dan benar.

Oleh karena itu Islam Politik atau Politik Islam itu perlu menjadi landasan dalam menjalankan sebuah pemerintahan apabila ia memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Karna bagi para Kiai, agama adalah jawaban segala problematika hidup termasuk problematika politik.

Para Kiai NU umumnya dalam menyikapi Islam politik, cukup berpegang dengan kaidah ushul fiqih yang menjadi jargon jamaah NU yaitu *al-muhafazhatsu 'ala Qodimissolih wal akhdzu bil jadidil aslah* (mempertahankan sesuatu yang baik dari masa lampau dan mau menerima sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang). Perubahan sosial politik dewasa ini membuat para Kiai cukup penting untuk terjun kedalam dunia politik apabila itu dianggap dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan untuk umat dan politik yang diperjuangkan adalah benar-benar berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman, seperti jujur, adil, amanah dan lain-lain. bukan kepada mengedepankan simbol-simbol agama yang sudah barang tentu orang pandai menilainya namun tidak pandai menyikapinya. Hal tersebut diatas yang menjadi salah satu alasan mengapa kiai NU lebih berani turun dalam dunia

politik praktis”.

Dalam pandangan seorang kiai Islam politik itu harus bangkit dalam merespon perubahan sosial politik yang terjadi dewasa ini demi kemaslahatan umat. Apabila Islam politik tidak diperjuangkan maka akan banyak orang-orang yang tidak berakhlak yang akan mengendalikan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam itu sendiri. Gerakan Islam politik harus difahami sebagai bagaimana caranya menciptakan kehidupan sosial politik yang mermoral, berakhlak dan berkarakter. Disamping itu juga harus ada misi bagaimana caranya untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan umat Islam pada khususnya dan tidak terus terpojokkan.

Para Kiai juga beranggapan bahwa kini saatnya para Kiai harus ikut bertarung dan ikut berkontribusi dalam menentukan arah politik umat. Sudah bukan zamannya lagi, ulama sebatas dikunjungi untuk dimintai dukungan. Itu telah berlalu dan tidak lagi relevan di zaman sekarang. Politik semakin dianggap tidak sehat dan berbahaya. Orang sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Maka dari itu nilai-nilai Islam lah yang akan menyelamatkan politik dari kegelapan itu. Tapi kalua Kiainya tidak mau terjun ke politik, atau ada yang terjun tapi tidak menyuarakan Islam dalam berpolitik sungguh itu sangat tidak akan mendatangkan perubahan bagi kemaslahatan umat Islam

Kiai harus terjun kedalam dunia politik, Islam politik harus maju dan berjuang, namun Islam politik yang harus dimaknai benar-benar disini adalah memperjuangkan kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

2. Kiai dan Wacana Pemberlakuan Perda Syariah

Agama Islam pada hakikatnya bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan makluk dengan Tuhannya (*Hablu min Allah SWT*). Lebih daripada itu Islam juga mengatur hubungan sesama makluk (*Hablu min An-Nas*). Oleh karena itu Islam dianggap sebagai *way of life* (jalan hidup), pedoman hidup bahkan pegangan hidup bagi pemeluknya yang dianggap mengatur dan menuntun dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan individu, sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Namun hal tersebut justru menjadi polemik bagi umat Islam itu sendiri, karena mereka masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda dalam memahami ajaran Islam itu sendiri yang kemudian diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada akhirnya Islam yang dimaksud oleh mereka adalah Islam yang menurut pemahaman dan penafsiran mereka masing-masing. Hal itulah yang menjadi sebab pokok munculnya gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia karena mereka memiliki klaim ajaran Islam yang menurut mereka benar dan sesuai.

Fenomena yang menarik dari munculnya gerakan-gerakan baru keagamaan Islam pasca reformasi di Indonesia adalah banyaknya gerakan keagamaan Islam yang mempunyai misi menegakkan syari'at Islam secara formal atau formalisasi syariat dalam ruang hukum positi di pemerintahan, berbeda dengan organisasi masa Islam yang hanya ingin menampilkan wajah islam dalam bingkai bernegara dengan mentranformasikan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara seperti NU dan Muhammadiyah.³⁹

³⁹ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007, hlm. 3.

Pasca tumbangnya Orde Baru merupakan momentum yang tepat bagi kembalinya isu-isu tentang penerapan Syariat Islam di Indonesia. Hal tersebut semakin mendapatkan angin segar ketika diluncurkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada momentum itulah banyak Pemerintah Daerah yang merancang dan menetapkan Perda (Peraturan Daerah) yang bermuatan Syariat Islam dengan kata lain Peraturan Daerah yang berorientasi kepada penerapan Syariat Islam di daerahnya.

Beberapa contoh dari Perda Syariat Islam di Indonesia daapt kita lihat di beberapa daerah yang gencar dengan penerapaaan perda syariat seperti di Tasikmalaya dengan lahirnya Perda dan Himbauan dari Bupati yang mengatur tentang berbagai perilaku masyarakat dalam tatanan sosial keagamaan seperti dilarangnya tidak menggunakan jilbab, pemisahan antara laki-laki dan perempuan di kolam renang, dilarang menjual dan mengkonsumsi minuman keras, dilarang membuka warung pada bulan puasa Ramadhan, dihilangkannya kegiatan sekolah formal di bulan Ramadhan, dan lain-lain.

Berbagai macam sikap yang muncul atas lahirnya perda syariat tersebut baik dukungan maupun penolakan terhadap penerapan perda syari'ah Islam ini menurut penulis berawal dari tingkat pemahaman seseorang terhadap syari'at Islam itu sendiri. Namun Setidaknya ada tiga kelompok masyarakat yang memberikan respon berbeda dalam menyikapi penerapan perda syariat tersebut.

Kelompok pertama, adalah mereka yang mendukung penerapan syari'at Islam, seperti beberapa partai yang berasaskan Islam yaitu PPP dan PBB, ormas keagamaan,

pemuda dan organisasi mahasiswa seperti Persis, Masyumi, KAMMI, Brigade Tholiban, Majelis Mujahidin Indonesia, dan lain-lain. Termasuk didalamnya para Kiai-kiai dan santri yang menjadi basis pendukung partai-partai Islam seperti PPP. Menurut kelompok ini, umat Islam dianggap sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, maka sudah sewajarnya syari'at Islam menjadi landasan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut para Kiai yang bergerak dalam gerakan formalisasi syariat ini bahwa menjalankan syari'at Islam adalah kewajiban bagi setiap umat Islam dan penegakkan syari'at Islam merupakan indikator tegaknya agama, Salah satu aturan yang perlu diformalisasikan menjadi perda adalah soal pakaian yang cenderung terbuka, soal konsumsi minuman keras dan lain sebagainya. Jadi Dari bawah wajib dijalankan syari'at dan dari atas perlu diperjuangkan di Parlemen. Oleh karena itu para Kiai tersebut memiliki peran-peran tersendiri dalam usaha untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam tersebut. Ada yang berusaha melalui jalur politik, jalur mendesak pemerintah daerah untuk mengusung perda syariat kepada DPRD, ada yang membuat gerakan sosial akar rumput dengan menyebarkan dan menguatkan masyarakat tentang pentingnya penegakan perda syarait. Mereka mendorong Fraksi-fraksi partai Islam terutama Fraksi PPP, PKS, PBB untuk terus mengupayakan tegaknya syari'at Islam. Begitu juga upaya lain dalam misi penegakan syariat Islam.

Keterlibatan Kiai dalam memberikan dukungan pada formalisasi syari'at Islam menegaskan bahwa peran Kiai di masyarakat bukan hanya sebatas pada pengajaran dan pendidikan agama saja. Mereka juga aktif dalam merespon kondisi sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang.

Peran kalangan Kiai yang mendukung formalisasi syari'at Islam seperti gambaran di atas tampaknya jelas. Mereka melakukan aktivitas dan gerakan sesuai kemampuan dan posisi mereka masing-masing. Hasil upaya kelompok Kiai inilah yang kemudian lahir beberapa peraturan pemerintah daerah yang mendukung pada formalisasi syari'ah Islam, seperti: simbol-simbil Islami, Visi Religius Islami, Pembedaan Kolam Renang Bagi Laki-Laki dan Perempuan, serta peraturan pemerintah lainnya.

Kelompok kedua, Kelompok yang menganggap Syari'at Islam itu lebih kepada hal-hal yang substansial atau kontekstual dari pada hal yang formal atau tekstual. Menurut mereka, Islam harus bersifat inklusif, menjadikan semua bagian dalam masyarakat sebagai keberagaman yang tidak bisa dipisahkan. Kelompok ini terdiri dari NU, Muhammadiyah, Akademisi, dan beberapa LSM Seperti LKaHam. Para Kiai yang tergabung dalam kelompok ini, dalam menyikapi isu penerapan perda syariat Islam lebih melihat bahwa penerapan syari'at lebih kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, bukan kepada simbol-simbol. Peran para Kiai-kiai tersebut dalam menyikapi isu ini adalah berusaha menjelaskan dan menegaskan kepada khalayak umum bahwa formalisasi syari'at Islam tidak perlu dilakukan, namun yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan umat supaya hidup dengan nilai-nilai Islami dan toleran. formalisasi syari'at Islam hanyalah kepentingan politik kelompok tertentu supaya mendapat dukungan dari kelompok Islam, dan setelah berhasil, maka komitmen tersebut ditinggalkan yang akhirnya kontra produktif dengan ajaran Islam seperti kewajiban bagi para pemimpin untuk menepati janji dan mewujudkan masyarakat yang adil.

Kelompok ketiga, Kelompok yang apatis terhadap isu